Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology
Homepage: https://journal.ilmudata.co.id/index.php/ijmst
Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 1600-1609
P-ISSN: 2986-6790, e-ISSN: 2986-6782

Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2025

Maya Sentia Anjelika Tampubolon, Melisa Patrisia Manurung, Fahmi Apriyansyah Siregar, Putri Kemala Dewi Lubis, Khairani Alawiyah Matondang
Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Medan
tampubolonmaya67@gmail.com, melisapatrisia2@gmail.com, fahmiapriyansyah.7233240022@gmail.com, putrikemala@unimed.ac.id, alawiyah@unimed.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2025. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2025, serta didukung oleh peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan pengkajian dokumen serta studi kepustakaan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menelaah penerapan SAP pada tujuh komponen laporan keuangan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Dairi telah menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan kebijakan akuntansi daerah. Penerapan basis akrual tercermin pada Neraca, LO, dan LPE, sedangkan LRA, LPSAL, dan LAK menggunakan basis kas sesuai kebijakan akuntansi yang dijelaskan dalam CaLK. Penelitian juga menemukan hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu pengurangan nilai aset bangunan akibat kekurangan volume fisik pekerjaan pada beberapa perangkat daerah sebesar Rp113.666.915,80. Temuan tersebut menunjukkan perlunya ketelitian dalam pengukuran dan pencatatan aset serta penguatan pengendalian internal. Dengan demikian, penerapan SAP berbasis akrual telah tercermin dalam penyusunan LKPD Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2025, tetapi peningkatan kualitas pencatatan dan pengelolaan aset tetap diperlukan agar informasi keuangan semakin akurat dan akuntabel.

Kata kunci: Standar Akuntansi Pemerintahan, Basis Akrual, Laporan Keuangan Daerah, Kabupaten Dairi.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of accrual-based Government Accounting Standards (SAP) in the Financial Statements of the Dairi Regency Government for Fiscal Year 2025. This research employs a descriptive method with a qualitative approach. Secondary data were obtained from the 2025 Regional Government Financial Statements (LKPD) of Dairi Regency, supported by relevant regulations, books, and scientific journals. Data were collected through document review and literature study. The data were analyzed descriptively and qualitatively by examining the implementation of SAP across seven financial statement components: the Budget Realization Report (LRA), Statement of Changes in Budget Surplus (LPSAL), Balance Sheet, Operational Report (LO), Cash Flow Statement (LAK), Statement of Changes in Equity (LPE), and Notes to the Financial Statements (CaLK). The findings indicate that the Dairi Regency Government has implemented accrual-based accounting policies in accordance with Government Regulation Number 71 of 2010 and regional accounting policies. Accrual accounting is reflected in the Balance Sheet, LO, and LPE, while the LRA, LPSAL, and LAK apply cash-based accounting. However, asset valuation discrepancies totaling IDR 113,666,915.80 were identified due to deficiencies in the physical volume of construction work. These findings highlight the importance of accurate asset measurement, recording, and stronger internal controls. Overall, accrual-based SAP has been implemented, although improvements in fixed asset management remain necessary to enhance financial accuracy and accountability.

Keywords: Government Accounting Standards, Accrual Basis, Regional Financial Statements, Dairi Regency

1. Pendahuluan

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berkaitan dengan penggunaan sumber daya keuangan untuk melaksanakan pembangunan dan memberikan

pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah dituntut untuk mengelola keuangan secara transparan dan bertanggung jawab. Salah satu bentuk pertanggungjawaban tersebut diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan yang disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Menurut Nordiawan (2016:25), penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan bertujuan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah sehingga informasi keuangan yang disajikan dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan serta mendukung terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan pedoman yang memuat prinsip-prinsip akuntansi sebagai dasar bagi pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Menurut Hendri (2020:8), SAP menjadi pedoman dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang diterapkan pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah hingga perangkat daerah di bawahnya. Saniya et al. (2025) menjelaskan bahwa SAP merupakan salah satu dasar utama dalam sistem akuntansi sektor publik di Indonesia dan wajib diterapkan oleh seluruh pemerintah daerah sebagai upaya memperbaiki tata kelola keuangan pemerintahan. Sejalan dengan hal tersebut, Prayogo et al. (2023) menyatakan bahwa SAP menjadi pedoman bagi entitas pelaporan pemerintah dalam menyusun laporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya standar yang sama, penyajian informasi keuangan diharapkan menjadi lebih seragam, dapat dipahami, serta dapat dibandingkan oleh berbagai pihak.

Penyusunan laporan keuangan pemerintah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengatur penerapan SAP berbasis akrual. Syarienda et al. (2019) menjelaskan bahwa basis akrual merupakan basis akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa keuangan pada saat terjadinya, tanpa memperhatikan waktu penerimaan atau pengeluaran kas. Halim (2008) menjelaskan bahwa dalam akuntansi terdapat beberapa basis yang digunakan untuk menentukan waktu pengakuan transaksi, yaitu basis kas (cash basis), basis akrual (accrual basis), basis kas modifikasi (modified cash basis), dan basis akrual modifikasi (modified cash accrual). Perbedaan di antara basis tersebut terletak pada waktu pengakuan transaksi serta perlakuan terhadap penerimaan, pengeluaran, hak, dan kewajiban dalam pencatatan akuntansi. Halim dan Kusufi (2014:49) menjelaskan bahwa dalam basis akrual, transaksi dan peristiwa lainnya dicatat ketika transaksi atau peristiwa tersebut berlangsung tanpa harus menunggu kas diterima maupun dibayarkan. Dengan demikian, pendapatan dapat diakui ketika hak pemerintah untuk menerima pendapatan telah timbul, sedangkan beban diakui ketika kewajiban atau penggunaan sumber daya terjadi meskipun pembayaran belum dilakukan.

Penerapan basis akrual dinilai mampu memberikan informasi keuangan yang lebih lengkap dibandingkan dengan basis kas. Amaliah, Afif, dan Aziz (2024) menjelaskan bahwa pencatatan berbasis kas memiliki keterbatasan karena transaksi baru diakui ketika terjadi penerimaan atau pengeluaran uang. Akibatnya, informasi mengenai hak yang belum diterima dan kewajiban yang belum dibayarkan belum dapat tergambarkan secara lengkap. Berbeda dengan basis kas, basis akrual mencatat transaksi pada saat hak dan kewajiban timbul sehingga kondisi keuangan pemerintah dapat disajikan dengan lebih mendekati keadaan yang sebenarnya. Widjajarso (2011) juga menjelaskan bahwa basis kas belum mampu menyediakan informasi yang memadai untuk mendukung pengambilan keputusan ekonomi, terutama mengenai utang dan piutang pemerintah. Selain itu, basis akrual dinilai lebih tepat dalam menggambarkan biaya operasional yang sebenarnya serta menyediakan informasi yang lebih dapat diandalkan mengenai aset dan kewajiban.

Meskipun demikian, penerapan basis akrual dalam pemerintahan juga memiliki tantangan, terutama berkaitan dengan penyesuaian sistem akuntansi dan penganggaran. Halim et al. (2012) berpandangan bahwa penerapan basis akrual dalam sistem akuntansi pemerintahan perlu memperhatikan keterkaitannya dengan sistem penganggaran agar informasi yang dihasilkan dapat saling mendukung. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan SAP berbasis akrual tidak hanya berkaitan dengan perubahan metode pencatatan, tetapi juga membutuhkan penyesuaian dalam proses pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah.

Dalam penerapannya, SAP berbasis akrual menghasilkan tujuh komponen laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Ketujuh komponen tersebut memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam menyajikan informasi mengenai pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, aktivitas operasional, arus kas, perubahan ekuitas, serta penjelasan atas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. LRA menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, sedangkan LPSAL menggambarkan perubahan saldo anggaran lebih selama periode pelaporan.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14765
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Neraca menyajikan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah, sementara LO menggambarkan pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. Selanjutnya, LAK menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas, LPE menunjukkan perubahan ekuitas, sedangkan CaLK memberikan penjelasan lebih terperinci mengenai kebijakan akuntansi dan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan.

Keberadaan laporan keuangan pemerintah daerah tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran, tetapi juga menjadi sumber informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menilai kondisi dan kinerja keuangan pemerintah. Setiap komponen laporan keuangan memiliki informasi yang berbeda, tetapi saling berkaitan dalam memberikan gambaran mengenai pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, kelengkapan dan ketepatan penyajian setiap komponen laporan keuangan menjadi hal penting agar informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah daerah. Penerapan SAP berbasis akrual juga perlu dilihat dari ketepatan pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan transaksi keuangan, bukan hanya dari keberadaan laporan keuangan yang telah disusun.

Dalam pelaksanaannya, penerapan SAP berbasis akrual membutuhkan ketelitian dalam proses pencatatan dan pengukuran setiap transaksi keuangan. Pemerintah daerah tidak hanya dituntut untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran kas, tetapi juga harus memperhatikan hak dan kewajiban yang timbul, termasuk pengelolaan aset yang dimiliki. Kesalahan dalam pengakuan maupun pengukuran transaksi dapat menyebabkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Oleh sebab itu, penerapan SAP berbasis akrual perlu didukung oleh sumber daya manusia yang memahami standar akuntansi pemerintahan, sistem pencatatan yang memadai, serta pengendalian internal yang mampu memastikan kesesuaian antara transaksi, dokumen pendukung, dan informasi yang dilaporkan. Tuati, Manuain, dan Sir (2025) mengungkapkan bahwa penerapan basis akrual yang disertai pengendalian internal yang efektif dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah serta mendukung peningkatan akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan publik.

Meskipun penerapan SAP berbasis akrual telah diatur melalui peraturan pemerintah, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian Mumu et al. (2023) mengenai penerapan SAP berbasis akrual pada laporan keuangan Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan secara umum telah mengacu pada PP Nomor 71 Tahun 2010. Namun, masih ditemukan ketidaksesuaian pada Laporan Realisasi Anggaran karena belum menyajikan beberapa pos, yaitu transfer dan pembiayaan. Sementara itu, penelitian Pandin et al. (2025) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka menemukan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi pemerintahan. Kurangnya pemahaman mengenai pengklasifikasian akun dan penyusunan laporan dapat memengaruhi proses penyajian informasi keuangan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan SAP tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan, tetapi juga memerlukan pemahaman terhadap standar akuntansi dan pengendalian internal yang memadai.

Dalam penyusunan laporan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Dairi telah menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Peraturan Bupati Dairi Nomor 39 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Bupati Dairi Nomor 30 Tahun 2025. Namun, berdasarkan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2025, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan dan penyajian keuangan daerah. Salah satunya adalah pengurangan nilai aset bangunan akibat kekurangan volume fisik pekerjaan pembangunan gedung pada beberapa perangkat daerah, yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD Sidikalang, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dengan total sebesar Rp113.666.915,80. Selain itu, CaLK juga mengungkapkan adanya kendala dalam pelaksanaan anggaran, seperti belum optimalnya target dan kinerja kegiatan serta kurangnya pemahaman dalam pengalokasian dana ke rekening belanja yang berdampak pada proses pelaksanaan kegiatan. Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam menilai ketepatan pengelolaan aset dan penyajian informasi keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah perlu dikaji untuk mengetahui bagaimana standar tersebut diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2025.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14765
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran dan penjelasan mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2025 yang diperoleh melalui situs resmi Pemerintah Kabupaten Dairi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan sumber pendukung berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan SAP berbasis akrual. Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri, membaca, dan mempelajari LKPD serta sumber-sumber pendukung yang relevan dengan topik penelitian. Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan, khususnya terkait penerapan basis akrual dalam pengakuan, pencatatan, dan penyajian transaksi keuangan pemerintah daerah. Hasil analisis tersebut digunakan untuk memberikan gambaran mengenai penerapan SAP berbasis akrual pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2025.

3. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menganalisis penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2025. Analisis dilakukan dengan menelaah tujuh komponen laporan keuangan yang disajikan dalam LKPD, yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Angka-angka yang disajikan pada tabel berikut bersumber dari LKPD Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2025 (audited), sedangkan uraian setelah tabel merupakan interpretasi berdasarkan data dan kebijakan akuntansi yang diungkapkan dalam CaLK.

3.1. Gambaran Umum Penerapan SAP Berbasis Akrual

Berdasarkan CaLK Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Dairi menyatakan bahwa penyusunan laporan keuangan telah menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, serta Peraturan Bupati Dairi Nomor 39 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 30 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi.

Penerapan basis akrual pada LKPD tidak berarti seluruh laporan menggunakan basis yang sama. CaLK menjelaskan bahwa basis kas digunakan untuk LRA, LPSAL, dan LAK, sedangkan basis akrual digunakan untuk Neraca, LO, dan LPE. Dengan demikian, penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah berjalan berdampingan dengan basis kas untuk pelaporan pelaksanaan anggaran dan arus kas. Pembagian tersebut merupakan kebijakan basis akuntansi yang secara eksplisit dijelaskan oleh Pemerintah Kabupaten Dairi dalam LKPD 2025.

Tabel 1. Basis Akuntansi pada Komponen LKPD Kabupaten Dairi Tahun 2025

Komponen laporan keuangan	Basis akuntansi	Fokus informasi
Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	Kas	Realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan
Laporan Perubahan SAL (LPSAL)	Kas	Perubahan saldo anggaran lebih
Neraca	Akrual	Posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal pelaporan
Laporan Operasional (LO)	Akrual	Pendapatan-LO, beban, serta surplus/defisit-LO
Laporan Arus Kas (LAK)	Kas	Arus kas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	Akrual	Perubahan ekuitas selama periode pelaporan
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)	Pengungkapan/keterangan	Rincian pos dan kebijakan akuntansi laporan keuangan

Sumber: CaLK LKPD Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2025,

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14765
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Pembagian basis tersebut menunjukkan bahwa pengakuan transaksi dalam laporan finansial telah diarahkan pada saat hak, kewajiban, atau peristiwa ekonomi terjadi, tidak semata-mata pada saat kas diterima atau dibayarkan. Sementara itu, LRA tetap menampilkan realisasi anggaran berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas. Oleh karena itu, penilaian penerapan SAP berbasis akrual perlu melihat keterkaitan antara laporan yang berbasis akrual dan laporan pelaksanaan anggaran yang berbasis kas, bukan hanya menilai satu laporan secara terpisah.

3.2. Analisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA menyajikan perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan serta belanja selama satu tahun anggaran. Laporan ini digunakan untuk melihat pencapaian target pendapatan dan pelaksanaan belanja Pemerintah Kabupaten Dairi.

Tabel 2. Ringkasan Anggaran dan Realisasi LRA Kabupaten Dairi TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Capaian
Pendapatan	1.187.928.899.909,00	1.133.210.254.085,22	95,39%
Belanja	1.225.933.869.777,00	1.084.692.212.892,05	88,48%
Surplus/(Defisit)	(38.004.969.868,00)	48.518.041.193,17	—
Penerimaan pembiayaan	39.004.969.868,00	39.004.969.868,14	100,00%
Pengeluaran pembiayaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00%
Pembiayaan netto	38.004.969.868,00	38.004.969.868,14	100,00%
SiLPA	0,00	86.523.011.061,31	—

Sumber: LKPD Kabupaten Dairi TA 2025

Berdasarkan Tabel 2, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp1.133.210.254.085,22 atau 95,39% dari anggaran sebesar Rp1.187.928.899.909,00. Dengan demikian, masih terdapat pendapatan yang belum terealisasi sebesar Rp54.718.645.823,78. Sementara itu, realisasi belanja mencapai Rp1.084.692.212.892,05 atau 88,48% dari anggaran. Selisih antara anggaran dan realisasi belanja menunjukkan bahwa sebagian alokasi belanja belum digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran.

Realisasi pendapatan yang lebih besar daripada realisasi belanja menghasilkan surplus-LRA sebesar Rp48.518.041.193,17. Setelah memperhitungkan pembiayaan netto sebesar Rp38.004.969.868,14, Pemerintah Kabupaten Dairi mencatat SiLPA sebesar Rp86.523.011.061,31. Nilai SiLPA tersebut menunjukkan adanya sisa anggaran pada akhir periode. Namun, SiLPA tidak dengan sendirinya menunjukkan efisiensi atau efektivitas belanja; penilaiannya tetap perlu mempertimbangkan ketercapaian program dan keluaran kegiatan yang direncanakan.

Tabel 3. Realisasi Pendapatan dan Belanja Berdasarkan Kelompok Utama

Uraian	Realisasi TA 2025 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	111.446.383.682,22
Pendapatan Transfer	1.007.913.212.733,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	13.850.657.670,00
Jumlah Pendapatan	1.133.210.254.085,22
Belanja Operasi	847.276.659.677,05
Belanja Modal	70.814.580.445,00
Belanja Tak Terduga	695.309.766,00
Belanja Transfer	165.808.669.004,00
Jumlah Belanja	1.084.692.212.892,05

Sumber: LKPD Kabupaten Dairi TA 2025

Komposisi pendapatan memperlihatkan bahwa pendapatan transfer sebesar Rp1.007.913.212.733,00 merupakan sumber pendapatan terbesar, jauh lebih tinggi dibandingkan PAD sebesar Rp111.446.383.682,22. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendapatan daerah masih sangat ditopang oleh transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Dari sisi belanja, belanja operasi menjadi kelompok dengan realisasi terbesar, yaitu

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14765
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Rp847.276.659.677,05. Informasi tersebut memberikan gambaran mengenai struktur fiskal daerah, sekaligus menjadi dasar untuk menilai kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

3.3 Analisis Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Tabel 4. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Kabupaten Dairi TA 2025

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Anggaran Lebih awal	39.004.969.868,14
Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	(39.004.969.868,14)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berjalan	86.523.011.061,31
Saldo Anggaran Lebih akhir	86.523.011.061,31

Sumber: LKPD Kabupaten Dairi TA 2025, Laporan Perubahan SAL.

LPSAL menunjukkan bahwa saldo anggaran lebih awal sebesar Rp39.004.969.868,14 digunakan sebagai penerimaan pembiayaan pada tahun berjalan. Pada akhir tahun, SiLPA yang terbentuk sebesar Rp86.523.011.061,31 sehingga saldo anggaran lebih akhir berada pada jumlah yang sama. Penyajian ini memperlihatkan kesinambungan antara saldo anggaran lebih awal, penggunaannya dalam pembiayaan, dan sisa pembiayaan pada akhir periode. Karena LPSAL menggunakan basis kas, informasi yang disajikan berfokus pada perubahan saldo anggaran, bukan pengakuan hak dan kewajiban secara akrual.

3.4 Analisis Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi pada 31 Desember 2025. Berbeda dengan LRA, Neraca disusun dengan basis akrual sehingga aset, kewajiban, dan ekuitas diakui berdasarkan kondisi pada tanggal pelaporan.

Tabel 5. Ringkasan Neraca Kabupaten Dairi per 31 Desember 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Aset lancar	132.432.639.441,71	131.881.720.529,34
Investasi jangka panjang	107.396.561.078,00	107.548.239.141,00
Aset tetap	1.484.395.178.444,34	1.489.899.104.283,65
Aset lainnya	9.602.487.808,04	11.084.135.694,88
Jumlah aset	1.733.826.866.772,09	1.740.413.199.648,87
Jumlah kewajiban	37.406.683.103,74	21.747.196.962,56
Ekuitas	1.696.420.183.668,35	1.718.666.002.686,31
Jumlah kewajiban dan ekuitas	1.733.826.866.772,09	1.740.413.199.648,87

Sumber: LKPD Kabupaten Dairi TA 2025

Jumlah aset Pemerintah Kabupaten Dairi per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp1.733.826.866.772,09, mengalami penurunan sebesar Rp6.586.332.876,78 dibandingkan tahun 2024. Aset tetap merupakan komponen terbesar, yaitu Rp1.484.395.178.444,34. Besarnya aset tetap menunjukkan bahwa sumber daya pemerintah daerah terutama berada dalam bentuk aset berumur manfaat lebih dari satu periode yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.Kewajiban pada akhir 2025 tercatat sebesar Rp37.406.683.103,74, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp21.747.196.962,56. Sementara itu, ekuitas tercatat sebesar Rp1.696.420.183.668,35. Jumlah kewajiban dan ekuitas sama dengan jumlah aset, sehingga persamaan dasar akuntansi pada Neraca terpenuhi. Penyajian piutang, persediaan, aset tetap, akumulasi penyusutan, kewajiban, dan ekuitas pada Neraca merupakan bukti bahwa laporan finansial tidak hanya mencatat arus kas, tetapi juga posisi sumber daya dan kewajiban pemerintah daerah.

Dari sisi penerapan akrual, pengakuan piutang dan kewajiban menjadi bagian penting karena keduanya mencerminkan hak dan kewajiban yang masih ada pada tanggal pelaporan. CaLK juga menjelaskan bahwa piutang disajikan setelah memperhitungkan penyisihan piutang, sedangkan aset tetap disajikan dengan memperhitungkan akumulasi penyusutan. Perlakuan tersebut sejalan dengan tujuan basis akrual untuk menyajikan posisi keuangan yang lebih menyeluruh.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14765
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

3.5 Analisis Laporan Operasional (LO)

Tabel 6. Ringkasan Laporan Operasional Kabupaten Dairi TA 2025 dan 2024

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Pendapatan-LO	1.020.348.190.331,64	1.068.516.395.883,09
Beban operasi	1.037.749.087.194,92	1.088.348.841.472,01
Surplus/(defisit) kegiatan operasional	(17.400.896.863,28)	(19.832.445.588,92)
Surplus/(defisit) kegiatan nonoperasional	(30.030.301,71)	(2.434.800,67)
Pos luar biasa	(695.309.766,00)	(2.254.610.365,00)
Surplus/(defisit)-LO	(18.126.236.930,99)	(22.089.490.754,59)

Sumber: LKPD Kabupaten Dairi TA 2025

Berdasarkan Tabel 6, pendapatan-LO tahun 2025 sebesar Rp1.020.348.190.331,64, sedangkan beban operasi mencapai Rp1.037.749.087.194,92. Dengan demikian, kegiatan operasional menghasilkan defisit sebesar Rp17.400.896.863,28. Setelah memperhitungkan defisit kegiatan nonoperasional sebesar Rp30.030.301,71 dan pos luar biasa sebesar Rp695.309.766,00, defisit-LO tercatat sebesar Rp18.126.236.930,99.LO menjadi salah satu komponen utama untuk melihat penerapan basis akrual karena pendapatan dan beban diakui berdasarkan timbulnya hak atau konsumsi sumber daya/kewajiban selama periode pelaporan. Nilai beban dalam LO tidak selalu sama dengan belanja dalam LRA. Sebagai contoh, beban penyusutan dan amortisasi serta beban penyisihan piutang dapat diakui dalam LO meskipun tidak menimbulkan pengeluaran kas pada saat pengakuannya. Perbedaan tersebut merupakan karakteristik penting akuntansi berbasis akrual.

Defisit-LO tahun 2025 lebih kecil dibandingkan defisit tahun 2024. Hal ini menunjukkan perbaikan nilai defisit sebesar Rp3.963.253.823,60. Meskipun demikian, pendapatan-LO masih lebih rendah daripada beban yang diakui selama periode berjalan. Oleh sebab itu, informasi LO perlu dibaca sebagai gambaran biaya dan pendapatan ekonomi pemerintah daerah, bukan disamakan dengan surplus atau defisit pada LRA.

3.6 Analisis Laporan Arus Kas (LAK)

Tabel 7. Ringkasan Laporan Arus Kas Kabupaten Dairi TA 2025

Uraian	Jumlah (Rp)
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	119.134.225.838,17
Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(71.616.184.645,00)
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	0,00
Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	20.118.409,00
Kenaikan kas bersih	47.538.159.602,17
Saldo akhir kas di BUD	86.523.011.061,31
Saldo akhir kas keseluruhan	86.615.604.770,66

Sumber: LKPD Kabupaten Dairi TA 2022

LAK menunjukkan arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp119.134.225.838,17. Aktivitas investasi menghasilkan arus kas bersih negatif sebesar Rp71.616.184.645,00, yang terutama berkaitan dengan pengeluaran untuk perolehan aset tetap dan penyertaan modal. Tidak terdapat arus kas bersih dari aktivitas pendanaan, sedangkan aktivitas transitoris menghasilkan arus kas bersih sebesar Rp20.118.409,00. Secara keseluruhan, terjadi kenaikan kas bersih sebesar Rp47.538.159.602,17.

Saldo akhir kas keseluruhan per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp86.615.604.770,66. Nilai ini berbeda dari saldo akhir kas di Bendahara Umum Daerah (BUD) sebesar Rp86.523.011.061,31 karena saldo akhir kas keseluruhan juga memperhitungkan kas lainnya di bendahara pengeluaran. Penyajian tersebut memperlihatkan

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14765
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

pentingnya rekonsiliasi antara saldo kas pada berbagai pengelola kas agar informasi kas pada akhir periode tersaji secara lengkap.

3.7 Analisis Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Tabel 8. Laporan Perubahan Ekuitas Kabupaten Dairi TA 2025

Uraian	Jumlah (Rp)
Ekuitas awal per 1 Januari 2025	1.718.666.002.686,31
Defisit-LO tahun berjalan	(18.126.236.930,99)
Koreksi ekuitas lainnya	(4.119.582.086,97)
Ekuitas akhir per 31 Desember 2025	1.696.420.183.668,35

Sumber: LKPD Kabupaten Dairi TA 2025

LPE memperlihatkan bahwa ekuitas awal tahun 2025 sebesar Rp1.718.666.002.686,31 mengalami penurunan setelah memperhitungkan defisit-LO sebesar Rp18.126.236.930,99 dan koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp4.119.582.086,97. Dengan demikian, ekuitas akhir tercatat sebesar Rp1.696.420.183.668,35. Penurunan ekuitas ini menunjukkan perubahan kekayaan bersih pemerintah daerah selama satu periode pelaporan.Koreksi ekuitas lainnya antara lain berkaitan dengan penyesuaian akumulasi penyusutan, penghapusan aset tetap, penghapusan aset rusak berat, penyisihan piutang, reklasifikasi aset tetap ke ekstrakomptabel, serta koreksi nilai aset lainnya. Adanya rincian koreksi tersebut menunjukkan bahwa perubahan nilai ekuitas tidak hanya berasal dari hasil operasional, tetapi juga dari penyesuaian dan pembetulan pencatatan atas akun-akun neraca. Pengungkapan koreksi melalui CaLK mendukung keterlacakan perubahan ekuitas.

3.8 Pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK berfungsi memberikan penjelasan naratif dan rincian atas angka yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE. Pada LKPD Kabupaten Dairi TA 2025, CaLK menguraikan dasar hukum, kebijakan akuntansi, basis pengakuan dan pengukuran, serta rincian masing-masing pos laporan keuangan. Keberadaan penjelasan tersebut membantu pengguna memahami bagaimana angka laporan keuangan dibentuk dan mengapa terdapat perbedaan antara laporan berbasis kas dan laporan berbasis akrual.Salah satu pengungkapan yang perlu diperhatikan adalah pengurangan nilai aset bangunan akibat kekurangan volume fisik pekerjaan pembangunan gedung pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD Sidikalang, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp113.666.915,80. Informasi ini penting karena menunjukkan bahwa pengakuan dan pengukuran aset tetap perlu didukung oleh kesesuaian antara nilai yang dicatat dengan kondisi fisik pekerjaan. Pengungkapan tersebut juga menegaskan perlunya verifikasi fisik, dokumentasi pekerjaan, dan rekonsiliasi data aset sebelum laporan keuangan disusun.

Selain itu, CaLK menguraikan adanya realisasi belanja yang tidak terserap seluruhnya. Jumlah belanja yang tidak terealisasi pada TA 2025 tercatat sebesar Rp141.241.656.884,95, yang terdiri dari belanja pegawai, barang dan jasa, hibah, modal, tak terduga, serta transfer. Informasi tersebut merupakan aspek pelaksanaan anggaran yang perlu diperhatikan dalam evaluasi kinerja. Namun, ketidakserapan anggaran tidak secara otomatis menunjukkan kesalahan penerapan SAP; hal tersebut lebih tepat dipahami sebagai informasi mengenai pencapaian pelaksanaan anggaran yang perlu dianalisis bersama target dan keluaran kegiatan. Secara keseluruhan, pengungkapan dalam CaLK telah menyediakan informasi pendukung yang diperlukan untuk membaca angka laporan keuangan. Pengungkapan mengenai aset, penyusutan, piutang, kewajiban, koreksi ekuitas, serta perbedaan belanja dan beban menjadi bagian penting dalam menilai penerapan akuntansi berbasis akrual.

3.9 Pembahasan Penerapan SAP Berbasis Akrual

Hasil telaah terhadap tujuh komponen LKPD menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Dairi telah menyusun laporan keuangan TA 2025 dengan mengacu pada kebijakan akuntansi berbasis akrual dan regulasi SAP yang disebutkan dalam CaLK. Penerapan tersebut tampak terutama pada Neraca, LO, dan LPE. Neraca menyajikan aset,

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14765
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

kewajiban, dan ekuitas pada tanggal pelaporan; LO menyajikan pendapatan dan beban selama periode berjalan; sedangkan LPE menjelaskan perubahan ekuitas yang dipengaruhi oleh defisit-LO dan koreksi ekuitas.

Pada saat yang sama, LRA, LPSAL, dan LAK disusun menggunakan basis kas sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Dairi. Oleh karena itu, penggunaan basis kas pada ketiga laporan tersebut tidak dapat langsung dinilai sebagai penyimpangan dari penerapan SAP berbasis akrual. Penilaian harus memperhatikan karakter masing-masing laporan dan kerangka SAP yang diterapkan pemerintah daerah. Temuan mengenai kekurangan volume fisik pekerjaan yang berdampak pada pengurangan nilai aset bangunan sebesar Rp113.666.915,80 menjadi catatan penting dalam aspek pengukuran dan pengendalian aset. Meskipun LKPD telah mengungkapkan nilai dan perangkat daerah yang terkait, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketepatan pengakuan aset tetap tidak hanya bergantung pada kebijakan akuntansi tertulis, tetapi juga pada ketelitian pemeriksaan fisik, administrasi kontrak, dan rekonsiliasi antara catatan aset dengan realisasi pekerjaan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Mumu, Kalangi, dan Kapojos (2023) yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menilai penerapan SAP berbasis akrual melalui komponen laporan keuangan. Penelitian Mumu et al. menemukan bahwa laporan keuangan entitas yang diteliti secara umum telah mengacu pada PP Nomor 71 Tahun 2010, tetapi masih terdapat pos LRA yang belum disajikan secara lengkap. Berbeda dengan temuan tersebut, pada LKPD Kabupaten Dairi TA 2025, tujuh komponen laporan keuangan telah dicantumkan dalam daftar dan susunan LKPD. Fokus evaluasi yang terlihat dari dokumen Dairi justru perlu diarahkan pada ketepatan pengukuran aset dan tindak lanjut atas pengungkapan kekurangan volume fisik pekerjaan.

Hasil penelitian ini juga dapat dibaca bersama temuan Pandin, Triani, dan Ilham (2025) yang menekankan pentingnya kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi, penyesuaian teknis, serta koordinasi antarunit dalam penerapan SAP. Akan tetapi, faktor-faktor tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai kendala yang terbukti terjadi di Kabupaten Dairi hanya berdasarkan LKPD yang dianalisis. Dokumen LKPD memberikan bukti mengenai kebijakan, angka, dan pengungkapan keuangan, tetapi tidak menyediakan hasil wawancara atau pengukuran langsung mengenai kompetensi pegawai dan efektivitas sistem informasi.

Dengan demikian, penerapan SAP berbasis akrual pada LKPD Pemerintah Kabupaten Dairi TA 2025 telah tercermin dalam penggunaan basis akrual pada laporan finansial serta pengungkapan kebijakan dan rincian akun dalam CaLK. Namun, penilaian bahwa seluruh proses telah sepenuhnya sesuai tidak dapat ditarik hanya dari keberadaan laporan dan kebijakan tersebut. Pengungkapan kekurangan volume fisik pekerjaan aset tetap menjadi area yang perlu mendapat perhatian melalui penguatan pengendalian internal, verifikasi fisik, dan rekonsiliasi aset secara berkala.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2025, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Dairi telah menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangannya. Penerapan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang berlaku. Penerapan basis akrual tercermin dalam penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Neraca menyajikan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah, dengan jumlah aset sebesar Rp1.733.826.866.772,09. Laporan Operasional mencatat defisit sebesar Rp18.126.236.930,99, sedangkan Laporan Perubahan Ekuitas menunjukkan saldo ekuitas akhir sebesar Rp1.696.420.183.668,35. Hal tersebut memperlihatkan bahwa transaksi keuangan tidak hanya dicatat berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas, tetapi juga berdasarkan timbulnya hak, kewajiban, pendapatan, dan beban selama periode pelaporan. Sementara itu, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Laporan Arus Kas masih menggunakan basis kas sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp1.133.210.254.085,22 dan realisasi belanja sebesar Rp1.084.692.212.892,05, sehingga menghasilkan surplus-LRA sebesar Rp48.518.041.193,17 dan SiLPA sebesar Rp86.523.011.061,31.Meskipun penerapan SAP berbasis akrual telah tercermin dalam penyajian laporan keuangan, masih terdapat aspek yang perlu mendapatkan perhatian, khususnya dalam pengelolaan dan pencatatan aset tetap. Hal ini terlihat dari adanya pengurangan nilai aset bangunan akibat kekurangan volume fisik pekerjaan pembangunan gedung pada beberapa perangkat daerah sebesar Rp113.666.915,80. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya ketelitian dalam pemeriksaan fisik, pengukuran, dan pencatatan aset pemerintah daerah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penerapan SAP

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14765
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

berbasis akrual pada Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2025 telah tercermin dalam kebijakan akuntansi dan penyajian laporan keuangannya. Namun, peningkatan kualitas pencatatan, ketepatan pengukuran, pengungkapan informasi, serta pengendalian internal tetap diperlukan agar laporan keuangan yang dihasilkan semakin akurat, transparan, dan akuntabel.

Referensi

1. Amaliah, D., Afif, M., & Aziz, A. (2024). Analisis perbandingan penerapan cash basis dengan accrual basis dalam penyusunan laporan keuangan pemerintahan (Studi kasus pada Satuan Kerja Direktorat Rumah Umum dan Komersial Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat). JAKA: Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Auditing, 5(2), 32–49.
2. Halim, Abdul, 2008. Akuntansi Sektor Publik; Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta.
3. Halim, Abdul, dan Syam Kusufi. (2012). Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik, dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah. Salemba Empat. Jakarta.
4. Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). Teori, konsep dan aplikasi akuntansi sektor publik, Edisi dua. Jakarta: Salemba Empat.
5. Hendri, W., Mariati. M., & Tamsil, T. (2020). Penerapan PSAP 05 Tentang Akuntansi Persediaan Pada Kantor Inspektorat Kab. Banteng. Accounting Journal, 1(4), 78-85.
6. Mumu, P., Kalangi, L., & Kapojos, P. M. (2023). Analisis penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual pada laporan keuangan daerah Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum), 7(3), 105–114.
7. Nordiawan, D. (2016). Akuntansi sektor publik (Edisi 2, Cetakan 5). Salemba Empat.
8. Pandin, E. R., Triani, N., & Ilham, S. (2025). Analisis penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kolaka. Jurnal Akuntansi Kompetif, 8(3), 761–769.
9. Peraturan Bupati Dairi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi. Pemerintah Kabupaten Dairi.
10. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2025 (Audited).
11. Peraturan Bupati Dairi Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
13. Prayogo, Y., Fikri, A. S., & Nandini, K. P. (2023). Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual dalam Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah. JURNAL MANAJEMEN SOSIAL EKONOMI (DINAMIKA), 3(2), 44–58.
14. Saniya, T., Yulianasari, N., & Herawati, H. (2025). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, Sistem Pengendalian Intern dan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah. SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business, 8(3).\
15. Syarienda, Y., Basri, H., & Fahlevi, H. (2019). Problematika Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah Aceh Tengah. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, 4(1), 56–68.
16. Tuati, N., Manuain, D., & Sir, J. (2025). Dampak implementasi akuntansi berbasis akrual dan pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao. Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas, 3(1), 1–11.
17. Widjajarso, Bambang. (2011). Penerapan Basis Akrual Pada Akuntansi Pemerintah Indonesia: Sebuah Kajian Pendahuluan.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14765
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)